

Tabel 5.1  
Rencana Program/ Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																							
							Tahun-1 (2014) (Sesuai DPA)		Tahun-2 (2015) (Sesuai DPA)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)															
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
								13.640.000.000		16.190.000.000		18.942.085.000		19.889.189.250		20.383.648.713														
MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan 2. Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik 4. Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK 5. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bersih Melayani	1. Nilai EKPPD Pemerintah Prov Sulse 2. Jumlah Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulse yang Nilai EKPPD Tinggi dan sangat Tinggi 3. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Jumlah SKPD Prov. SulSel dengan Nilai akuntabilitas kinerja >65. 5. Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material 6. Opini BPK atas LKPD Prov Sulse 8. % Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenaan 9. Jumlah Unit Kerja Pelayanan yang memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Bebas Korupsi	x	VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Opini BPK-RI atas LKPD Prov. Sulse b. Tindak Lanjut Rekomendasi temuan Aparat pengawasan eksternal (BPK) c. Hasil EKPPD PemProv. Sulse secara d. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sulse	WTP 552 / 653 atau 84,53% Tinggi C (Kurang)	WTP 85,62% Tinggi C (Kurang)	8.071.846.000	WTP 86,72% Tinggi CC (Cukup)	9.088.194.000	WTP 87,00% Tinggi CC (Cukup)	10.049.600.000	WTP 87,50% Tinggi CC (Cukup)	10.826.780.000	WTP 88,00% Tinggi B (Baik)	12.080.000.000														
																	1	- Pemeriks. Reguler SKPD Provinsi.	1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan reguler pada SKPD Provinsi. 2. Terlaksananya pemeriksaan internal secara berkala.	60 SKPD Prov	62 Unit Kerja	2.238.390.000	62 Unit Kerja	2.385.034.000	62 Unit Kerja	2.500.000.000		2.661.780.000		2.750.000.000
																	2	- Pemeriks. Reguler Kab/Kota dan PAMJAB Kepala Daerah	1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan reguler Kab/Kota dan PAMJAB Kepala Daerah 2. Terlaksananya pemeriksaan internal secara berkala.	24 kab/kota	24 Kab/Kota	1.308.439.000	24 Kab/Kota	1.900.000.000	24 Kab/Kota	2.092.928.000		2.300.000.000		2.500.000.000
																	3	- Reviu LKPD Provinsi dan LK SKPD	1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Reviu LKPD Provinsi dan LK SKPD. 2. Terlaksananya pemeriksaan internal secara berkala.		1 LKPD/ 30 SKPD	296.380.000	1 LKPD/ 24 SKPD	340.670.000	1 LKPD/ 24 SKPD	375.000.000		400.000.000		450.000.000
																	4	- Pegawai Tertentu, dan evaluasi akip	1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan tujuan tertentu. 2. Terlaksananya pengawasan Tertentu.		Riks Tuj Tertentu 16 tim, Ev lakip 12 Kab/Kot, Dik/Kes gratis 24 kab/kot, Was CPNS, Ev. SPIP 12 skpd.	1.902.870.000	Riks Tuj Tertentu 16 tim, Ev lakip 6 Kab/Kot, Dik/Kes gratis 24 kab/kot, Ev Lakip 12 SKPD, Ev. SPIP 12 skpd.	2.014.990.000	Riks Tuj Tertentu 25 tim, Ev lakip 6 Kab/Kot, Dik/Kes gratis 24 kab/kot, Ev Lakip 12 SKPD, Ev. SPIP 12 skpd.	2.500.000.000		2.750.000.000		2.800.000.000
																	5	Pendampingan Satuan dan Asistensi	1. Termanfaatkannya hasil Pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya pendampingan skpd Prov. Sulse		Pendampingan 60 Unit Kerja asistensi RKA 60 Unit Kerja selaku TAPD	252.723.000	Pendampingan 62 Unit Kerja asistensi RKA 62 Unit Kerja selaku TAPD	242.000.000	Pendampingan 62 Unit Kerja asistensi RKA 62 Unit	250.000.000		275.000.000		300.000.000
																	6	Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP	1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan inspektoral provinsi sulse sebagai bahan evaluasi pengambil keputusan/kebijakan. 2. Terlaksananya ekspose pokok-pokok hasil pemeriksaan untuk penerbitan LHP.		158 LHP	405.822.000	161 LHP	450.000.000	173 LHP	480.672.000		485.000.000		509.250.000
																	7	Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan	1. Termanfaatkannya data temuan hasil pemeriksaan pada SKPD Prov/Kab/Kota bagi pengambil keputusan/kebijakan. 2. Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.		4 Triwulan	29.800.000	4 Triwulan	31.000.000	Simwas HP	32.000.000		35.000.000		36.750.000
																	8	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	1. Tersedianya data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 2. terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) inspektoral provinsi dan Irjen dan BPK.		3 kali	151.027.000	3 kali	155.000.000	Pemutakhiran data 3 kali	160.000.000		170.000.000		190.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun-1 (2014) (Sesuai DPA)		Tahun-2 (2015) (Sesuai DPA)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				9	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	1. Terpantainya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. 2. Terlaksananya monitoring dan pengujian tindak lanjut hasil pemeriksaan.	25 Tim SKPD Prov, 10 Tim Ijlen/BPK, 23 Tim TLHP Kab/Kot, 1 Tim Pemutahiran Data TLHP Regional	419.602.000	25 Tim SKPD Prov, 10 Tim Ijlen/BPK, 23 Tim TLHP Kab/Kot, 1 Tim Pemutahiran Data TLHP Regional	425.000.000	TLHP BPK, ITJEN, ITPROV	450.000.000		475.000.000		500.000.000	
				10	Pemutakhiran Data Tingkat Regional Di Provinsi Sulawesi Selatan	1. Termanfaatkannya data/informasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tingkat regional. 2. Terlaksananya pemutakhiran data tingkat regional Provinsi Sulsel.										500.000.000	
				11	Evaluasi dan Monitoring Program Strategis	1. Terlaksananya program strategis Pemprov Sulsel dengan baik. 2. Terlaksananya koordinasi evaluasi dan monitoring program strategis.	1 Tahun	109.316.000	1 Tahun	115.000.000	PMPRB	125.000.000		135.000.000		200.000.000	
				12	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	1. Tertatanya sinergi pemeriksaan pengawasan dan aparat pengawasan intern pemerintah. 2. Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan daerah dan nasional.	3 Keg.	263.900.000	3 Keg.	279.000.000	Rakorwasda dan Rakorwasdas	290.000.000		305.000.000		350.000.000	
				13	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Tersedianya data informasi yang mengukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota. 2. Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota.	24 Kab/Kota	408.241.000	24 Kab/Kota	430.500.000	EPPD 24 Kab/Kota	444.000.000		467.000.000		550.000.000	
				14	Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Bawasda/Inspektorat Kabupaten/Kota	1. Termanfaatnya hasil fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan Inspektorat kab/Kota. 2. Terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan bawasda/inspektorat Kabupaten/Kota.	24 Kab/Kota	285.336.000	24 Kab/Kota	320.000.000	24 lIkab/Kota	350.000.000		368.000.000		444.000.000	
				x	<b>XI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>a. Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Skpd PROV</b>	Zona Integritas	Zona Integritas	398.836.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	440.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	556.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	624.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	648.000.000
					<b>b. Pendampingan pencegahan Korupsi pada Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)</b>		5	5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota		5 Kab/Kota	
				1	Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	1. Terselenggaranya Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2. Usulan Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Zona Integritas	Zona Integritas	95.800.000	Zona Integritas	105.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	120.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	126.000.000	2 Unit Kerja WBK/WBBM	150.000.000
				2	Pendampingan Pencegahan Korupsi di Kab/Kota	1. Terselenggaranya Pendampingan Pencegahan Korupsi di Kab/Kota 2. Identifikasi permasalahan pada PTSP dan PBJ	5	5 Kab/Kota	303.036.000	3 Angkatan Wor	335.000.000	5 Kab/Kota	436.000.000	5 Kab/Kota	498.000.000	5 Kab/Kota	498.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun-1 (2014) (Sesuai DPA)		Tahun-2 (2015) (Sesuai DPA)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MASYARAKAT BERPERAN SERTA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	1. % Penyelesaian Penanganan Kasus Penyalahgunaan wewenang 2. % Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat 3. % Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	x	X. <b>Peningkatan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan	1	100%	513.840.000	100%	599.990.000	100%	645.000.000	100%	678.000.000	100%	750.000.000
				1. Penanganan Pengaduan masyarakat	1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat dalam meminimalkan penyimpangan. 2. Terlaksananya penanganan laporan pengaduan masyarakat.	21 LHP	18 LHP	513.840.000	19 LHP	599.990.000	25 LHP	645.000.000	25 LHP	678.000.000	25 LHP	750.000.000
MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN, TATA LAKSANA DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN	1. Meningkatkan kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan 2. Tatalaksana pengawasan yang sinergi dan terkordinasi	1. % Pejabat fungsional yang bersertifikasi 2. % Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik 3. % aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS 4. % Kesesuaian kegiatan pengawasan yang sesuai dengan PKPT	x	VII. <b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	Semakin meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme aparat pengawasan	6 Kali PKS=300 Orang, 14 Orang Diklat Fungs., 4 angk. BinteK=160 Orang, JFA=47 orang	6 Kali PKS=300 Orang, 14 Orang Diklat, 4 angk. BinteK=160 Orang	872.907.000	6 Kali PKS=300 Orang, 14 Orang Diklat, 4 angk. BinteK=160 Orang,	1.000.056.000	12 Kali PKS=600 Orang, 100 Orang Diklat, 8 angk. BinteK=240 Orang	2.227.000.000	12 Kali PKS=600 Orang, 100 Orang Diklat, 8 angk. BinteK=240 Orang	2.224.409.250	12 Kali PKS=600 Orang, 100 Orang Diklat, 8 angk. BinteK=240 Orang	2.194.048.713
				1. Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Pada Diklat Instansi Terkait	1. Meningkatnya Sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan kantor sendiri dan penyertaan dalam Diklat Teknis Fungsional.	6 Kali PKS=300 Orang	6 Kali PKS=300 Orang	90.000.000	7 PKS (In house training) Total 350 Peserta.	100.000.000	12 Kali PKS=600 Orang	221.500.000	12 Kali PKS=600 Orang	171.500.000	12 Kali PKS=600 Orang	172.000.000
				2. Pendidikan Fungsional	1. Peningkatan SDM bagi aparat pengawasan. 2. Terlaksananya kepesertaan mengikuti diklat/kursus/sosialisasi fungsional bagi aparat pengawasan.	14 Orang Diklat Fungs.	23 Orang Diklat Fungs.	391.023.000	24 Orang Diklat Fungs.	311.356.000	100 Orang Diklat	932.000.000	100 Orang Diklat	990.409.250	100 Orang Diklat	937.048.713
				3. Pelatihan Teknis/ Bimbingan Teknis	1. Peningkatan SDM tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. 2. Kepesertaan mengikuti BIMTEK fungsional bagi aparat pengawasan.	4 angk. BinteK=160 Orang	2 angk. BinteK=80 Orang	258.004.000	4 Angkatan Total 116 Orang Peserta	452.700.000	8 angk. BinteK=240 Orang	905.500.000	8 angk. BinteK=240 Orang	907.000.000	8 angk. BinteK=240 Orang	910.000.000
				4. Pematapan Jabatan Fungsional	1. Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional. 2. Tersedianya data perencanaan pengembangan jabatan fungsional dan kode etik aparat pengawas.	1 Tahun	1 Tahun	39.750.000	1 Tahun	42.000.000	1 Tahun	48.000.000	1 Tahun	50.500.000	1 Tahun	55.000.000
				5. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	1. Termanfaatkannya angka kredit bagi pejabat fungsional auditor. 2. Terlaksananya perhitungan dan penilaian angka kredit pejabat fungsional auditor.	JFA=47 orang	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	94.130.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	94.000.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	120.000.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	105.000.000	Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun	120.000.000
				x VIII. <b>Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	Tersusunnya kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi	2 Kebijakan	4 Kebijakan	29.500.000	4 Kebijakan	31.000.000	4 Kebijakan	31.500.000	4 Kebijakan	33.000.000	4 Kebijakan	35.000.000
				1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan	1. Termanfaatkannya kebijakan pengawasan. 2. Terlaksananya penyusunan kebijakan pengawasan.	2 Kebijakan	5 Kebijakan	29.500.000	4 Kebijakan	31.000.000	4 Kebijakan	31.500.000	4 Kebijakan	33.000.000	4 Kebijakan	35.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun-1 (2014) (Sesuai DPA)		Tahun-2 (2015) (Sesuai DPA)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			X	<b>IX. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Dimanfaatkannya web site Inspektorat sebagai media informasi pengawasan</b>	1 tahun	1 Tahun	46.000.000	1 Tahun	207.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	58.000.000	1 Tahun	100.000.000
				1 Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan	1. Termanfaatkannya situs inspektorat sebagai media informasi. 2. Tersedianya media informasi pengawasan berbasis internet.	1 tahun	1 Tahun	46.000.000	1 Tahun	207.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	58.000.000	1 Tahun	100.000.000
			X	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien</b>	15 Keg.	1 Tahun	1.924.794.000	1 Tahun	2.594.380.000	1 Tahun	2.111.600.000	1 Tahun	2.236.000.000	1 Tahun	2.309.000.000
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Termanfaatkannya pelayanan jasa surat menyurat. 2. Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat.	1 Tahun	1 Tahun	11.300.000	1 Tahun	12.300.000	1 Tahun	18.000.000		20.000.000		21.000.000
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Termanfaatkannya alat komunikasi, air dan listrik dengan memadai. 2. Tersedianya media komunikasi telepon, fax, air PDAM, dan daya listrik.	1 Tahun	1 Tahun	177.600.000	1 Tahun	295.900.000	1 Tahun	240.000.000		255.000.000		260.000.000
				3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Termanfaatkannya surat-surat kelengkapan kend dinas/operasional. 2. Tersedianya kelengkapan perizinan kendaraan dinas/operasional.	23 Unit Kend.	10 Unit Roda 4 dan 11 Unit Roda 2.	17.500.000	10 Unit Roda 4	21.400.000	1 Tahun	22.000.000		23.000.000		24.000.000
				4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Terciptanya ruangan dan halaman kantor yang bersih dan nyaman. 2. Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor.	1 Tahun	1 Tahun	149.900.000	1 Tahun	176.550.000	1 Tahun	191.600.000		200.000.000		210.000.000
				5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1. Termanfaatkannya peralatan kerja dengan baik. 2. Terpeliharanya peralatan kerja kantor (komputer, printer, dan jaringan LAN).	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	37.450.000	1 Tahun	39.000.000		40.000.000		42.000.000
				6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Termanfaatkannya alat tulis kantor dengan baik dan memadai. 2. Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor.	1 Tahun	1 Tahun	193.990.000	1 Tahun	230.050.000	1 Tahun	240.000.000		250.000.000		260.000.000
				7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Termanfaatkannya barang cetakan dan penggandaan dengan memadai/cukup. 2. Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan.	1 Tahun	1 Tahun	122.680.000	1 Tahun	144.450.000	1 Tahun	150.000.000		175.000.000		180.000.000
				8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Termanfaatkannya penerangan kantor. 2. Tersedianya penerangan bangunan kantor (bola lampu dan lampu sorot).	100 Bola Lampu Sorot	80 Bolam Lampu, 8 Lampu Sorot, 1 set	56.400.000	80 Bolam Lam	319.900.000	Bolam Lampu	16.000.000		17.000.000		17.000.000
				9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Termanfaatkannya peralatan dan perlengkapan kantor. 2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	30 Unit Peralatan kantor	26 Unit Peralatan kantor	220.300.000	26 Unit Peralat	346.300.000	Peralatan Kantor	155.000.000		164.000.000		172.000.000
				10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Termanfaatkannya buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan. 2. Tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan.	1 Set (50 Buku)	1 Set buku dan surat kabar harian	36.100.000	1 Set buku dan	53.500.000	surat kabar harian 1 tahun	55.000.000		57.000.000		60.000.000
				11 Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Termanfaatkannya makanan dan minuman untuk peningkatan kerja. 2. Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu dan minuman pegawai.	1 Tahun	1 Tahun	108.500.000	1 Tahun	128.400.000	1 Tahun	130.000.000		140.000.000		145.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun-1 (2014) (Sesuai DPA)		Tahun-2 (2015) (Sesuai DPA)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Termanfaatkannya hasil-hasil rapat koordinasi dan konsultasi. 2. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi.	5 Kegiatan	6 Kab/Kota	171.379.000	6	128.400.000	6	150.000.000		160.000.000		165.000.000
				13	Peningkatan Administrasi Umum	1. Termanfaatkannya penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi dan tugas-tugas perkantoran. 2. Terlaksananya penataan adm. Umum	32 Laporan	8 laporan	407.757.000	8	438.700.000	8	440.000.000		450.000.000		460.000.000
				14	Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian	1. Tertibnya penataan administrasi kepegawaian 2. Terlaksananya penataan administrasi kepegawaian	8 Laporan	8 laporan	178.388.000	800,00%	207.580.000	800,00%	210.000.000		225.000.000		230.000.000
				15	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1. Terelesaikannya data keuangan inspektorat berbentuk sistem informasi. 2. Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	1 tahun	1 tahun	43.000.000	1 tahun	53.500.000	1 tahun	55.000.000		60.000.000		63.000.000
					<b>ii. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD</b>				<b>1.172.601.000</b>		<b>1.612.380.000</b>		<b>2.613.385.000</b>		<b>2.523.000.000</b>		<b>1.552.600.000</b>
					<b>Termanfaatkannya sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelayanan kediklatan yang profesional</b>		7 Keg.	8 Keg.	<b>774.553.000</b>	9 Keg.	<b>1.089.450.000</b>	9 Keg.	<b>2.043.585.000</b>	8 Keg.	<b>2.010.000.000</b>	7 Keg.	<b>915.000.000</b>
				1	Pembangunan Gedung Kantor	1. Termanfaatkannya Gedung baru menunjang operasional kantor. 2. Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor	0	-		1 paket	224.000.000	1 paket lanjutan	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000
				2	Pengadaan Mobil Jabatan	1. Termanfaatkannya Mobil Jabatan Eselon2 dalam menunjang kinerja Inspektur 2. Terlaksananya pengadaan Mobil Jabatan Eselon 2.	0	-						1 Unit	450.000.000		
				3	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	1. Termanfaatkannya kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan dinas operasional kantor. 2. Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua.	Roda 4 = 1 Unit	-		2 Unit roda 2	40.000.000	2 Unit Mob Operasional	550.000.000	2 Unit Mob Operasional	460.000.000		
				4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1. meningkatnya kinerja aparat dengan dukungan sarana dan prasarana. 2. Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung.	18 buah / 3 jenis	Refil Pengharum Ruangan 1 thn, Refil Tabung	22.200.000	Refil Pengharum	78.800.000	Refil pengharum Ruangan, AC, LCD.	150.000.000		110.000.000		115.000.000
				5	Pengadaan Meubeler	1. Termanfaatkannya mebeleur untuk pejabat dan staf. 2. Tersedianya meja dan kursi pejabat/staf.	11 Buah/ 2 Jenis	132 Kursi rapat Aula	132.000.000	17 set meja da	60.000.000	Meja Rapat, Meja Kerja, Kursi Rapat, Kursi Kerja	218.585.000		78.000.000		80.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun-1 (2014) (Sesuai DPA)		Tahun-2 (2015) (Sesuai DPA)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				6	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1. Terpeliharanya kondisi gedung kantor dengan baik. 2. terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.	6 Jenis / 1 Tahun	1 pkt Pemeliharaan interior Gedung ,	365.083.000	Asuransi Bang	406.650.000	Asuransi Bangunan, Pemeliharaan rulin Gedung,	480.000.000		400.000.000		200.000.000
				7	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	1. Terpeliharanya kondisi mobil jabatan dengan baik. 2. Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan.	1 Unit / 1 Tahun	1 unit / 1 tahun	68.100.000	1 unit / 1 tahun	75.000.000	1 unit / 1 tahun	80.000.000		84.000.000		85.000.000
				8	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Terpeliharanya kondisi kendaraan operasional dengan baik. 2. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional.	R4= 8 Unit R2= 11 Unit	9 Unit roda 4 dan 11 Unit roda 2	142.670.000	9 Unit roda 4 dan 11 Unit roda 2	155.000.000	9 Unit roda 4 dan 11 Unit roda 2	160.000.000		170.000.000		175.000.000
				9	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1. Terpeliharanya kondisi AC gedung kantor. 2. Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC.	30 Unit AC/ 1 Tahun	AC=1 tahun	44.500.000	AC=1 tahun	50.000.000	AC=1 tahun dan CCTV 1 tahun, vacuum cleaner 1 tahun, genset 1 tahun	55.000.000		58.000.000		60.000.000
				10	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1. Terpeliharanya kondisi gedung kantor dalam jangka waktu 5 tahun. 2. Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor .						WC/ Toilet 6 unit, Pelataran Parkir.	150.000.000				
					<b>Meingkatnya Disiplin Kehadiran dan Penggunaan Seragam untuk meningkatkan kinerja.</b>	131 PNS / 2 Kegiatan	3 keg	108.700.000	2 keg	210.000.000	4 Keg	244.800.000	2 keg	162.000.000	2 keg	270.600.000	
				11	Pengadaan mesin/kartu absensi	1. meningkatnya kedisiplinan pegawai. 2. Terlaksananya pengadaan mesin absensi pegawai.											
				12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	1. Termanfaatkannya pakaian dinas harian PNS. 2. Tersedianya keseragaman pakaian dinas.	153 stel	153 stel	62.150.000	142 Stel Pakaian PNS,140 Kelengkapan Pakaian Dinas,16 Stel Pakaian Tenaga Outsourching.	75.000.000	PDH= 147 stel, PSR=1, PKL(outs)=16	99.800.000	PDH= 145 stel, PSR=1, PKL(outs)=16	90.000.000	153 stel	110.000.000
				13	Pengadaan Pakaian Korpri	1. Termanfaatkannya pakaian korpri bagi PNS. 2. Tersedianya pakaian seragam korpri bagi aparat Inspektorat Prov Sulsel.						Pak. Korpri 147 stel	63.000.000	Pak. Korpri 145 stel			
				14	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	1. Termanfaatkannya pakaian batik dan /atau olah raga bagi PNS. 2. Tersedianya pakaian seragam batik dan /atau olah raga bagi aparat inspektorat Prov. Sulsel.	Pak. Olah raga 140 stel	140 stel	46.550.000	140 Baju Korpri,140 Pak. Olahraga PNS16 Pak. Olahraga Outsourching140 Baju Batik PNS,16Baju Batik Outsourching.	135.000.000	Pak. Olah raga 147 stel	82.000.000	Pak. Olah raga 145 stel	72.000.000	Pak. Olah raga 140 stel dan Baju Batik 140 buah	160.600.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun-1 (2014) (Sesuai DPA)		Tahun-2 (2015) (Sesuai DPA)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					<b>Meningkatkan kapasitas aparatur</b>	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran (2 Keg.)	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran 2	289.348.000	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran	312.930.000	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran	325.000.000	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran	351.000.000	100 peserta sosialisasi & 1 event pameran	367.000.000
				15 Sosialisasi Pengawasan	1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. 2. Terlaksananya sosialisasi pengawasan.	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	179.755.000	2 Angkatan 200 Peserta, 1 Pameran	213.430.000	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	200.000.000	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	210.000.000	100 peserta Sosialisasi & 1 event pameran	220.000.000
				16 Pendidikan dan Pelatihan Formal	1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. 2. Kepesertaan aparat pengawasan pada Pendidikan dan Pelatihan formal.	2 orang	5 orang	6.000.000	6 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000	3 orang	16.000.000	3 orang	17.000.000
				17 Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi	1. meningkatnya budaya pengawasan dikalangan penyelenggara Pemerintah Daerah di Prov. Sulsel. 2. Terlaksananya gelar pengawasan tingkat provinsi.		1 Kali (175 peserta)	103.593.000	1 Keg, 175 Peserta.	84.500.000	1 Kali (175 peserta)	110.000.000	1 Kali (175 peserta)	125.000.000	1 Kali (175 peserta)	130.000.000
			x	<b>V. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja SKPD</b>	<b>Termanfaatkannya hasil kegiatan dalam mendukung peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan</b>	3 Keg	3 keg	609.676.000	3 keg	617.000.000	3 keg	653.000.000	3 keg	686.000.000	3 keg	715.000.000
				1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Termanfaatkannya bahan evaluasi pengukuran kinerja Inspektorat Prov. Sulsel. 2. Terlaksananya penyusunan LAKIP, Laporan ikhtisar realisasi kinerja dan Penyusunan bahan LKPJ Gubernur.	6 Laporan / 1 Tahun	6 Laporan / 1 Tahun	19.100.000	6 Laporan / 1 Tahun	22.000.000	6 Laporan / 1 Tahun	23.000.000		24.000.000		25.000.000
				2 Kegiatan Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan	1. Termanfaatkannya hasil perencanaan dan pengendalian pengawasan. 2. Terlaksananya peningkatan perencanaan dan pengendalian pengawasan melalui penyusunan, pengkajian, pembahasan dan atau asistensi dokumen-dokumen anggaran dan kegiatan inspektorat.	16 Laporan	11 Laporan	371.736.000	15 Laporan	370.000.000	15 Laporan	390.000.000		410.000.000		430.000.000
				3 Peningkatan Administrasi Keuangan	1. Termanfaatkannya laporan administrasi keuangan. 2. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan melalui penyusunan laporan-laporan keuangan.	7 Laporan	11 Laporan	218.840.000	11 Laporan	225.000.000	11 Laporan	240.000.000		252.000.000		260.000.000